

TAHUNAN TAHUN 2016



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP)**

PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

LaporanBarang Milik Negara

Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016

UntukPeriodeyangBerakhir31Desember2016

Nomor : Lap-2/PW30.1/2017

Tanggal : 3 Februari 2017

JalanHayam Wuruk 7Jakarta 1012

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Banten ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2017
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Bagian Tata Usaha,

Catur Iman Pratignyo
NIP 19650306 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
LAPORAN POSISI BMN DI NERACA	3
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN	4
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL	5
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL	6
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN	7
LAPORAN PENYUSUTAN	8
LAPORAN BPYBDS	9
LAPORAN BARANG HILANG	10
LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT	11
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILLIK NEGARA	12
A. PENDAHULUAN	12
1. Dasar Hukum	12
2. Entitas Pelaporan	14
3. Periode Laporan	14
B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	15
1. Kapitalisasi	15
2. Penyusutan Aset Tetap	15
C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	16
D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	17
1. Saldo Awal	17
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	18
E. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN	34
F. INFORMASI BMN LAINNYA	35
1. Perkembangan Nilai BMN	35
2. Informasi Pengelolaan BMN	35
3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN	36
LAMPIRAN	

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN

LAPORAN PENYUSUTAN

LAPORAN BPYBDS

LAPORAN BARANG HILANG

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- q. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- s. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013.

2. Entitas Pelaporan

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan, UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan unit akuntansi dengan fungsi rangkap. Dengan kata lain, selain sebagai UAKPB, Perwakilan BPKP Provinsi Banten juga merupakan UAPPB-W yang memiliki wewenang menguasai BMN di lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten ini disusun dan disajikan untuk Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 Periode yang Berakhir 31 Desember 2016.

B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kapitalisasi

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut.

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar sebagai berikut.

1. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
2. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
5. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp19.119.599.427,00 (*sembilan belas milyar seratus sembilan belas juta*

lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 sebesar (Rp700.786.828,00) (*Tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan/atau pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan system aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan)
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah
7. Laporan Kondisi Barang (Untuk Tahunan)
8. Laporan Penyusutan
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

1. Saldo Awal

Nilai BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp19.820.386.255,00 (*Sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari nilai BMN

intrakomptabel (nilai BMN disajikan di Neraca 01 Januari 2016) sebesar Rp19.820.183.855,00 (*sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp202.400,00 (*dua ratus dua ribu empat ratus rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp608.516.698,00 (*enam ratus delapan juta lima ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 Tanggal 01 Januari 2016 sebesar Rp663.033.759,00 (*enam ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*) dan mutasi persediaan selama Periode laporan sebesar (Rp54.517.061,00) (*lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

No	Kode	Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Mutasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
1	117111	Barang Konsumsi	Rp457.389.045	Rp406.401.801	(Rp50.987.244)
2	117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp 25.440.500	Rp 33.675.500	Rp 8.235.000
3	117131	Bahan Baku	Rp 0	Rp 0	Rp 0
4	117199	Persediaan Lainnya	Rp180.204.214	Rp168.439.397	(Rp11.764.817)
Total			Rp663.033.759	Rp608.516.698	(Rp54.517.061)

Tidak terdapat barang persediaan kondisi rusak berat dan usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (Intrakomptabel) seluas 420 m² dengan nilai sebesar Rp492.800.000,00 (*empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu*

rupiah). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Periode Tanggal 01 Januari 2016 yang disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptabel) seluas 420 m² dengan nilai sebesar Rp492.800.000 (*empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Tanah di atas, tidak terdapat jumlah bidang Tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	420 m ²	Rp492.800.000,00
Rusak Ringan	0 m ²	Rp 0
Rusak Berat	0 m ²	Rp 0

Tidak terdapat Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) sebanyak 3.105 unit dengan nilai sebesar Rp7.277.905.451,00 (*tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 3.103 unit dengan nilai sebesar Rp7.254.235.451,00 (*tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*) dan mutasi tambah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp23.670.000,00 (*dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi kurang.

Rincian Peralatan dan Mesin per kelompok barang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

1) 3.01.03 Alat Bantu

Saldo Alat Bantu pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna

Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp76.344.000,00 (*tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp76.344.000,00 (*tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Bantu di atas, tidak terdapat Alat Bantu yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	5 unit	Rp76.344.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) 3.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 14 unit dengan nilai sebesar Rp1.177.254.500,00 (*satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 14 unit dengan nilai sebesar Rp1.177.254.500,00 (*satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, tidak terdapat Alat Angkutan Darat Bermotor yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan. Rincian data Alat Angkutan Darat Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	14 unit	Rp1.177.254.500,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) 3.02.02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp682.000,00 (*enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp682.000,00 (*enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Angkutan Darat Tak Bermotor di atas, tidak terdapat Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Angkutan Darat Tak Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp682.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4) 3.03.01 Alat Bengkel Bermesin

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 2

unit dengan nilai sebesar Rp1.717.000,00 (*satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 30 Juni 2016 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp1.717.000,00 (*satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Bengkel Bermesin di atas, tidak terdapat Alat Bengkel Bermesin yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Bengkel Bermesin berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	2 unit	Rp1.717.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

5) 3.05.01 Alat Kantor

Saldo Alat Kantor pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 541 unit dengan nilai sebesar Rp1.145.889.564,00 (*satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 541 unit dengan nilai sebesar Rp1.145.889.564,00 (*satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Kantor di atas, tidak terdapat Alat Kantor yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	541 unit	Rp1.145.889.564,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) 3.05.02 Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 2.080 unit dengan nilai sebesar Rp2.428.610.400,00 (*dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 2.080 unit dengan nilai sebesar Rp2.428.610.400,00 (*dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Rumah Tangga di atas, tidak terdapat Alat Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	2.080 unit	Rp2.428.610.400,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

7) 3.06.01 Alat Studio

Saldo Alat Studio pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna

Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 38 unit dengan nilai sebesar Rp119.725.000,00 (*seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 38 unit dengan nilai sebesar Rp119.725.000,00 (*seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Studio di atas, tidak terdapat Alat Studio yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	38 unit	Rp119.725.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

8) 3.06.02 Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 108 unit dengan nilai sebesar Rp143.943.940,00 (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 108 unit dengan nilai sebesar Rp143.943.940,00 (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Komunikasi di atas, tidak terdapat Alat Komunikasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	108 unit	Rp143.943.940,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

9) 3.06.03 Peralatan Pemancar

Saldo Peralatan Pemancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah/nilai Peralatan Pemancar di atas, tidak terdapat Peralatan Pemancar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Peralatan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp1.500.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Peralatan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

10)3.07.01 Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak

4 unit dengan nilai sebesar Rp4.329.000,00 (*empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp4.329.000,00 (*empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Kedokteran di atas, tidak terdapat Alat Kedokteran yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kedokteran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	4 unit	Rp4.329.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

11)3.10.01 Komputer Unit

Saldo Komputer Unit pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 179 unit dengan nilai sebesar Rp1.587.566.158,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 178 unit dengan nilai sebesar Rp1.575.096.158,00 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) dan mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp12.470.000,00 (*dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi kurang.

Rincian mutasi tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
P.C. Unit	Rp12.470.000	Rp 0

Dari jumlah/nilai Komputer Unit di atas, tidak terdapat Komputer Unit yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	179 unit	Rp1.587.566.158,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

12)3.10.02 Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 129 unit dengan nilai sebesar Rp574.761.889,00 (*lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 128 unit dengan nilai sebesar Rp563.561.889,00 (*lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dan mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp11.200.000,00 (*sebelas juta dua ratus ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi kurang.

Rincian mutasi tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rp11.200.000	Rp 0

Dari jumlah/nilai Peralatan Komputer di atas, tidak terdapat Peralatan Komputer yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Peralatan komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	129 unit	Rp574.761.889,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

13)3.12.01 Alat Pengeboran Mesin

Saldo Alat Pengeboran Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Alat Pengeboran Mesin di atas, tidak terdapat Alat Pengeboran Mesin yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Pengeboran Mesin berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp600.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Alat Pengeboran Mesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

14) 3.17.01 Unit Peralatan Proses/Produksi

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp14.982.000,00 (*empat belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Jumlah tersebut

sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp14.982.000,00 (*empat belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Unit Peralatan Proses/Produksi di atas, tidak terdapat Unit Peralatan Proses/Produksi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Unit Peralatan Proses/Produksi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	2 unit	Rp14.982.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Unit Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

15) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebesar Rp6.723.158.682,00 (*enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*).

d. 1) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp22.114.715.821,00 (*dua puluh dua milyar seratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp21.817.199.821,00 (*dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh belas*

juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan mutasi tambah nilai sebesar Rp297.516.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi kurang.

Rincian mutasi tambah nilai Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
1	Penggantian Panel Induk Listrik Kantor	0	Rp143.000.000	Rp 0
2	Rehabilitasi Gedung Kantor Penghubung	0	Rp154.516.000	Rp 0
	Jumlah	0	Rp297.516.000	Rp 0

Dari jumlah/nilai Gedung dan Bangunan di atas, tidak terdapat Gedung dan Bangunan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	6 unit	Rp22.114.715.821,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat kelompok Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel sebesar Rp4.680.938.861,00 (*empat milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).

e. 1) Jaringan

Saldo Jaringan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel

sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal Per 01 Januari 2016 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai Jaringan di atas, tidak terdapat Jaringan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Jaringan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	2 unit	Rp300.000.000,00
Rusak Ringan	0 unit	Rp 0
Rusak Berat	0 unit	Rp 0

Tidak terdapat Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) Akumulasi Penyusutan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jaringan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan di Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

f. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.793.937.970,00 (*tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	Aset Lancar			
1	Persediaan	Rp 608.516.698	Rp 0	Rp 608.516.698
Jumlah Sub A		Rp 608.516.698	Rp 0	Rp 608.516.698
B	Aset Tetap			
1	Tanah	Rp 492.800.000	Rp 0	Rp 492.800.000
2	Peralatan & Mesin	Rp 7.257.664.451	Rp20.241.000	Rp 7.277.905.451
3	Gedung & Bangunan	Rp22.114.715.821	Rp 0	Rp22.114.715.821
4	Jaringan	Rp 300.000.000	Rp 0	Rp 300.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0
6	KDP	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Jumlah Sub B		Rp30.165.180.272	Rp20.241.000	Rp30.185.421.272
C	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Aset Tak Berwujud	Rp 0	Rp 0	Rp 0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Ops. Pemerintah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Jumlah Sub C		Rp 0	Rp 0	Rp 0
Total		Rp30.773.696.970	Rp20.241.000	Rp30.793.937.970

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 Per Perkiraan Neraca adalah sebagai berikut.

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	Aset Tetap			
1	Peralatan & Mesin	Rp 6.723.158.682	Rp20.241.000	Rp 6.743.399.682
2	Gedung & Bangunan	Rp 4.680.938.861	Rp 0	Rp 4.680.938.861
3	Jaringan	Rp 250.000.000	Rp 0	Rp 250.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5	KDP	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Jumlah Sub A		Rp11.654.097.543	Rp20.241.000	Rp11.674.338.543

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
B	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Jumlah Sub B		Rp 0	Rp 0	Rp 0
Total		Rp11.654.097.543	Rp20.241.000	Rp11.674.338.543

g. Perbandingan Nilai BMN pada laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMAK-BMN) dengan Laporan Keuangan (SAIBA) pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 Per Akun Neraca adalah sebagai berikut.

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	Rp 608.516.698	Rp 608.516.698	Rp 0
2	Tanah	Rp 492.800.000	Rp 492.800.000	Rp 0
3	Peralatan & Mesin	Rp 7.277.905.451	Rp 7.277.905.451	Rp 0
4	Gedung & Bangunan	Rp22.114.715.821	Rp22.114.715.821	Rp 0
5	Jaringan	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Rp 0
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0
7	KDP	Rp 0	Rp 0	Rp 0
8	Aset Tak Berwujud	Rp 0	Rp 0	Rp 0
9	Aset Lain-lain *)	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Total		Rp30.773.696.970	Rp30.773.696.970	Rp 0

*) Aset Lain-lain pada Laporan Barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan.

E. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten Periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp129.555.965,00 (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lahan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten dengan luas 95,10 m² di sewa oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. untuk Kantor Kas/Cabang Pembantu (Jakarta KP. BPKP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 pembayaran tahap III dilakukan pada semester I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp101.905.965,00 (*seratus satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
- b. Lahan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten dengan luas 5,04 m² di sewa oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. untuk keperluan jasa perbankan berupa ATM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 pembayaran tahap III dilakukan pada semester I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp13.489.000,00 (*tiga belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- c. Lahan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten dengan luas 8,84 m² di sewa oleh PT. BRI (Persero), Tbk. untuk keperluan jasa perbankan berupa ATM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran tahap II dilakukan pada Semester II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp14.161.000,00 (*empat belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- d. Rincian penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari Tanah dan Bangunan Gedung Kantor dan Lahan Tanah Bangunan Kantor tersebut meliputi:

No	Uraian BMN	Jenis Pemanfaatan	Penerimaan Negara/PNBP
1	Lahan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan luas 95,10 m ²	Sewa	Rp101.905.965
2	Lahan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 5,04 m ²	Sewa	Rp 13.489.000

3	Lahan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 8,84 m ²	Sewa	Rp 14.161.000
Jumlah			Rp129.555.965

F. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

No.	Periode Lap.	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2009	27.978.109.649	0	0,00%
2	2010	28.165.753.263	187.643.614	0,67%
3	2011	28.731.288.076	565.534.813	1,97%
4	2012	29.231.196.716	499.908.640	1,71%
5	2013	29.501.244.251	270.047.535	0,92%
6	2014	29.770.568.055	269.323.804	0,90%
7	2015	30.527.269.031	756.700.976	2,48%
8	2016	30.793.937.970	266.668.939	0,87%

2. Informasi Pengelolaan BMN

Penetapan status penggunaan BMN periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

No	Uraian	Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Belum Ditetapkan Status Penggunaan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Tanah	1	492.800.000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	3.103	7.233.994.451	2	23.670.000
3	Gedung dan Bangunan	6	21.817.199.821	0	297.516.000
4	Jaringan	2	300.000.000	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah			29.843.994.272	0	321.186.000

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN, tidak ada yang perlu di ungkapkan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.